

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini, penelitian memaparkan hasil serta pembahasan yang diperoleh setelah melakukan studi kasus di lapangan mengenai peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Palembang. Data yang dikumpulkan mencakup berbagai pertanyaan dan jawaban yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

A. Sejarah sekolah

SMA Muhammadiyah 4 Palembang adalah sekolah swasta yang didirikan pada 1 Juli 1983 sebagai bagian dari upaya Persyarikatan Muhammadiyah dalam memperluas layanan pendidikan menengah di Kota Palembang. Pada masa awal berdirinya, sekolah ini hanya memiliki 39 orang siswa, dengan fasilitas yang masih sederhana. Meskipun begitu, semangat pengelola dan dukungan masyarakat menjadikan sekolah ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Yang dimana pertempat di Jln. D.I Panjaitan RT.13 RW.04 Kelurahan Plaju Ilir, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan nomor SK Pendirian No. 225/M/475/II-35/1970 Akta Notaris dari PP Muhammadiyah No. 4326/II-003/SMS-83/1988. Yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Drs. M. Kamil Tarmizi dan Wakilnya Abdul Karim dengan keadaan siswa sebanyak 39 orang di tahun pertama. Di bawah kepemimpinan para kepala sekolah tersebut, SMA Muhammadiyah 4 Palembang terus berkembang secara akademik maupun non-akademik. Sekolah juga mendapatkan akreditasi B, yang menunjukkan bahwa sekolah telah memenuhi berbagai standar mutu pendidikan nasional. Saat ini, SMA Muhammadiyah 4 Palembang menjadi salah satu sekolah swasta berbasis Islam yang aktif berperan dalam mencetak generasi muda berakhlak, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan zaman. Dengan semangat tajdid (pembaharuan) khas

Muhammadiyah, sekolah ini terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikannya dari tahun ke tahun.

B. Deskripsi Data

Penelitian ini berfokus pada peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Palembang peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana Peran kepala sekolah sebagai pendik, sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai fasilitator kemitran, sebagai inovasi dan juga pendidikan inklusif akses dan kesetaran, pembelajaran dalam pendidikan inklusif, prinsip-prinsip pendidikan inklusif, implementasi pendidikan inklusif. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif kenapa metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data langsung dari para informan melalui wawancara mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pengalaman, pandangan, serta strategi yang digunakan dalam mengelola anak ABK di lingkungan sekolah tanpa adanya asumsi atau prasangka tertentu. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai fenomena yang diteliti.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, Pertama peneliti melakukan observasi langsung untuk memahami situasi dan dinamika pelaksanaan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Palembang. Observasi ini membantu peneliti mengidentifikasi berbagai aspek penting yang berkaitan dengan peran kepala sekolah dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif di sekolah. Kedua, wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu kepala sekolah, guru pendamping khusus (GPK), guru mata pelajaran, wali kelas, serta peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) dan teman sebaya mereka. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi mendalam mengenai kebijakan, strategi, serta praktik kepala sekolah dalam mendukung pendidikan inklusif. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan

dokumen terkait, terutama dokumen kebijakan sekolah, program layanan pendidikan inklusif, serta dokumentasi kegiatan pendukung seperti pelatihan guru, pendampingan peserta didik, dan kerjasama dengan orang tua maupun lembaga eksternal. Dengan menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti memperoleh data yang komprehensif mengenai bagaimana kepala sekolah menjalankan perannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Palembang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi penguatan manajemen pendidikan inklusif serta menjadi referensi bagi sekolah lain dalam mengembangkan layanan pendidikan yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan semua peserta didik

C. Hasil Penelitian

Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif merupakan proses yang melibatkan aktivitas Sebagai pendidik, Sebagai manajer, sebagai administrator, Sebagai supervisor, Sebagai fasilitator dan Sebagai inovasi ada juga tentang akses dan kestaran, Pembelajaran dalam pendidikan inklusif, Prinsip-prinsip Pendidikan Inklusif dan Implementasi pendidikan inklusif yang bertujuan untuk menghasilkan ide, konsep dan solusi baru melalui pemikiran yang inovatif, guna menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Secara umum peran kepala sekolah adalah kepribadian dan sikap aktifnya dalam mencapai tujuan. Mereka aktif dan juga kreatif, membentuk ide dari pada menanggapi untuk mereka. Kepemimpinan kepala sekolah cenderung mempengaruhi perubahan suasana hati, menimbulkan kesan dan harapan, dan tepat pada keinginan dan tujuan khusus yang ditetapkan untuk urusan yang terarah. Hasil kepemimpinan ini mempengaruhi perubahan cara orang berpikir tentang apa yang dapat diinginkan, dimungkinkan, dan diperlukan., Pemimpin sekolah yang dimaksud di atas adalah kepala sekolah. Pendidikan Inklusif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengubah sistem pendidikan dengan menghilangkan hambatan yang

menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Dalam konteks peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang terlibat dalam ini adalah kepala sekolah, guru bimbingan konseling, wali kelas dan masyarakat/ orang tua. Untuk mencapai semua ini hasil optimal mengadakan rapat didalam ruangan yang di siapkan oleh kepala sekolah.

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Palembang. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan kepala sekolah dan guru , wali kelas serta siswa X,XI dan XII. Pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam yang melibatkan sembilan informan. Hasil wawancara akan dianalisis berdasarkan tiga murid yang ABK, indikator utama, yaitu aktivitas Sebagai pendidik, Sebagai manajer, sebagai administrator, Sebagai supervisor, Sebagai fasilitator dan Sebagai inovasi ada juga tentang akses dan kestaran, Pembelajaran dalam pendidikan inklusif, Prinsip-prinsip Pendidikan Inklusif dan Implementasi pendidikan inklusif. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada bagaimana program kepala sekolah dan pendidikan inklusif Dengan analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kepala sekolah, guru, wali kelas dan murid yang ada yang ada di sma muhammadiyah 4 Palembang Hasil wawancara kemudian diuraikan berdasarkan instrumen penelitian yang didasarkan pada teori yang relevan, sebagai berikut :

1. Sebagai Pendidik (Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Sesuai hasil penelitian ini sebagai pendidik peran kepala sekolah dalam konsep sistem pendidikan yang menjamin semua anak, termasuk yang berkebutuhan khusus, memiliki hak yang sama untuk belajar bersama dalam lingkungan yang aman, setara, dan mendukung. Hal ini berarti sekolah menyediakan kesempatan belajar

bagi semua siswa tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, atau emosional, dan berusaha menghilangkan diskriminasi serta eksklusi. Di karenakan menciptakan lingkungan yang adil, setara, dan ramah bagi semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman. Penerapannya membantu siswa mengembangkan empati, menghargai perbedaan, membangun karakter yang kuat, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara akademik dan sosial, sesuai dengan hak setiap anak atas pendidikan yang berkualitas. Di karenakan Yang terlibat adalah pihak tenaga pendik contohnya wali kelas dan guru bimbingan konseling, Kepala sekolah, waka kurikulum, dan murid ABK. Di karenakan Kegiatannya bisa dimasjid diruangan atau kantor karena tidak ada ruangan khusus untuk anak ABK karena fasilitasnya memandai. pada Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia mulai digalakkan secara formal pada awal tahun 2000-an, ditandai dengan dikeluarkannya berbagai peraturan seperti Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang mewajibkan sekolah umum menerima siswa berkebutuhan khusus. Dimana harus pentapan visi dan misi yang jelas dan juga guru harus diadakan pelatihan secara workshop secara baik agar memahami murid saat belajar secara berkala. Komite melibatkan banyak pihak terkait dalam pendidikan inklusif ini dan bertanggung jawab atas semua ini kepala sekolah melakukan observasi langsung proses pembelajaran anak tersebut. Komite melibatkan banyak pihak terkait dalam pendidikan inklusif ini dan bertanggung jawab atas semua ini kepala sekolah melakukan observasi langsung proses pembelajaran anak tersebut. pertanyaan ini sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat dengan informan 1 kepala sekolah Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang (*kode wcr.01*).

Dapat kita simpulkan bawahsanya Pendidikan inklusif bahwa kepala sekolah memegang peranan penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab menjamin bahwa seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK),

memperoleh hak pendidikan yang sama dalam lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari diskriminasi. Melalui perumusan visi dan misi yang berorientasi pada inklusivitas, kepala sekolah berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan sekolah yang adil, setara, dan menghargai keberagaman. Keberhasilan pendidikan inklusif juga sangat bergantung pada kerja sama berbagai pihak, seperti wali kelas, guru bimbingan dan konseling, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, komite sekolah, serta peserta didik. Kepala sekolah memiliki tugas untuk mengoordinasikan seluruh unsur tersebut, termasuk menyelenggarakan pelatihan atau workshop bagi guru secara berkala agar mampu memahami dan melayani kebutuhan belajar siswa ABK dengan baik. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti belum tersedianya ruang khusus bagi siswa ABK, tidak menjadi penghalang utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Sekolah tetap berupaya memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran. Sejak dicanangkannya kebijakan pendidikan inklusif secara resmi di Indonesia, khususnya melalui Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, sekolah umum diwajibkan untuk menerima dan memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. Melalui pemantauan dan observasi langsung terhadap proses pembelajaran, kepala sekolah dapat memastikan bahwa pendidikan inklusif berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dengan demikian, setiap peserta didik memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang secara akademik dan sosial, sekaligus menumbuhkan sikap empati, saling menghargai, dan karakter positif dalam lingkungan sekolah yang inklusif dan bermutu.

2. Sebagai Manajer (Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Sesuai hasil penelitian ini kepala Sekolah sebagai Manajer Bentuk kebijakan dan program yang mendukung pendidikan inklusif mencakup pelatihan guru, penyesuaian kurikulum dan pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta dukungan guru pendamping. Kebijakan juga mencakup peraturan yang mengamankan penyelenggaraan pendidikan inklusif di setiap daerah untuk memastikan hak anak berkebutuhan khusus mendapatkan akses pendidikan yang sama, anak berkebutuhan khusus banyak membawa manfaat bagi anak itu sendiri. Pendidikan dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus akan dikembangkan dan berguna bagi kehidupannya, karena banyak anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh anak pada umumnya. Data atau dokumen disimpan diruangan guru bimbingan konseling karena gurunya baru masuk tiga bulan maka data baru diberikan oleh kepala sekolah maka data tersebut belum dibaca dan dilihat secara akurat. dimana Evaluasi program inklusif dapat dilakukan secara berkala (misalnya setiap bagi rapat atau satu tahun sekali), selama proses pembelajaran, dan setelah proses pembelajaran selesai. Waktu evaluasi yang tepat bergantung pada tujuan dan kebijakan program, namun evaluasi rutin atau selama proses berjalan penting untuk memantau kemajuan secara berkelanjutan. Kepala sekolah mengelola sumber daya untuk mendukung kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan menetapkan visi inklusif, mengembangkan kurikulum yang fleksibel, memastikan guru memiliki pelatihan yang memadai, menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang aksesibel, serta membangun kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Kepala sekolah juga perlu melakukan evaluasi dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan program berjalan efektif. Komite melibatkan banyak pihak terkait dalam pendidikan inklusif ini dan bertanggung jawab

atas semua ini Guru BK melakukan observasi langsung proses pembelajaran anak tersebut. pertanyaan ini sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat dengan informan 2 Guru BK Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang (*kode wcr.03*)

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan dibawah kepala sekolah berperan sebagai manajer utama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta program yang mendukung pendidikan inklusif. Kebijakan tersebut meliputi penyelenggaraan pelatihan bagi guru, penyesuaian kurikulum dan proses pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta ketersediaan guru pendamping bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Selain itu, kebijakan pendidikan inklusif juga didasarkan pada peraturan yang mewajibkan setiap daerah menyelenggarakan pendidikan inklusif guna menjamin hak ABK untuk memperoleh akses pendidikan yang setara. Kehadiran ABK dalam lingkungan sekolah memberikan manfaat yang besar, terutama dalam membantu mengenali dan mengembangkan potensi serta bakat khusus yang dimiliki anak, yang sering kali tidak dimiliki oleh anak pada umumnya dan berguna bagi kehidupannya di masa depan. Pengelolaan data dan dokumen terkait ABK disimpan di ruang guru bimbingan dan konseling, namun karena guru yang bersangkutan masih baru bertugas, data tersebut belum sepenuhnya dipelajari dan dianalisis secara optimal. Evaluasi program pendidikan inklusif dilakukan secara berkala, baik selama proses pembelajaran berlangsung maupun pada akhir periode tertentu, seperti saat pembagian rapor atau evaluasi tahunan. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi penting untuk memantau perkembangan dan efektivitas program. Dalam mendukung kebutuhan ABK, kepala sekolah mengelola sumber daya sekolah dengan menetapkan visi yang inklusif, mengembangkan kurikulum yang fleksibel, memastikan guru memiliki kompetensi melalui pelatihan, menyediakan fasilitas yang aksesibel, serta menjalin kerja sama dengan orang tua dan masyarakat. Upaya ini dilengkapi dengan

evaluasi dan pendampingan yang berkesinambungan agar pelaksanaan pendidikan inklusif dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

3. Sebagai Administrator (Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa administrator ini sebagai pengelola, beserta pertanggungjawab yang besar Bentuk supervisi yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru dalam pembelajaran inklusif meliputi supervisi akademik melalui observasi kelas, diskusi dan wawancara, serta pembinaan individual untuk meningkatkan kompetensi guru. Supervisi ini juga bisa dilakukan secara lebih luas melalui kepemimpinan inklusif, seperti menetapkan visi, terlibat dalam perencanaan, dan melakukan audit kesetaraan untuk memastikan semua siswa terpenuhi kebutuhannya. memungkinkan pemantauan yang berkelanjutan untuk menilai dan meningkatkan kualitas pengajaran, mengembangkan profesionalisme guru, serta mengidentifikasi kebutuhan perbaikan yang tepat sasaran. (seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, atau guru senior) dan guru atau staf sekolah lainnya yang sedang disupervisi. Proses ini juga dapat melibatkan partisipan lain, seperti wakil kepala sekolah bidang kurikulum, serta staf pendidik dan kependidikan lainnya. Waktu yang tepat untuk melakukan supervisi adalah di awal tahun ajaran, setiap awal dan akhir semester, serta secara berkala selama proses pembelajaran. Melalui pendekatan yang positif dan konstruktif, seperti memberikan masukan spesifik, saran perbaikan yang jelas, dan apresiasi atas kinerja baik. Komite melibatkan banyak pihak terkait dalam pendidikan inklusif ini dan bertanggung jawab atas semua ini wali kelas melakukan observasi langsung proses pembelajaran anak tersebut. pertanyaan ini sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat dengan informan 3 wali kelas Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang (*kode wcr.02*)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa administrator ini sebagai pengelola, Bentuk supervisi yang dilakukan kepala sekolah dalam pembelajaran inklusif antara lain observasi kelas, diskusi individual, dan pemberian umpan balik konstruktif. Supervisi akademik perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memberikan dukungan kepada guru. Yang terlibat dalam proses supervisi pembelajaran antara lain kepala sekolah, guru, pengawas sekolah (jika ada), dan staf ahli (jika diperlukan). Waktu yang tepat untuk melakukan supervisi adalah secara berkala sepanjang tahun ajaran, dengan jadwal yang telah disepakati bersama antara kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah memberikan umpan balik kepada guru setelah supervisi dilakukan melalui diskusi langsung, memberikan catatan tertulis, dan memberikan saran-saran perbaikan yang spesifik dan konstruktif. Komite melibatkan banyak pihak terkait dalam pendidikan inklusif ini dan bertanggung jawab atas semua ini wali kelas melakukan observasi langsung proses pembelajaran anak tersebut. pertanyaan ini sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat dengan informan 2 wali kelas Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang (*kode wcr.04*)

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di SMA Muhammadiyah 4 Palembang, dapat disimpulkan bahwa Kepala sekolah sebagai administrator memiliki tanggung jawab besar dalam merencanakan, mengelola, mengalokasikan, dan mempertanggung jawabkan sumber daya keuangan serta administrasi sekolah secara efektif dan transparan demi peningkatan mutu pembelajaran dan kompetensi guru. Dalam konteks pembelajaran inklusif, kepala sekolah melakukan supervisi akademik melalui observasi kelas, diskusi, wawancara, serta pembinaan individual, yang bertujuan memantau kualitas pengajaran, mengidentifikasi kebutuhan perbaikan, dan memberikan dukungan profesional bagi guru. Proses supervisi ini melibatkan berbagai pihak seperti pengawas sekolah, wakil kepala

sekolah bidang kurikulum, guru senior, serta wali kelas yang turut melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus. Supervisi dilaksanakan secara berkala sepanjang tahun ajaran, terutama pada awal tahun, setiap awal dan akhir semester, dan pada waktu yang disepakati bersama. Melalui pendekatan positif dan konstruktif, kepala sekolah memberikan umpan balik spesifik, catatan tertulis, serta saran perbaikan yang jelas. Komite sekolah juga berperan dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, sehingga seluruh pihak dapat bekerja sama memastikan kebutuhan semua siswa terpenuhi.

4. Sebagai Supervisor (Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah Sebagai supervisor dalam program. Peran kepala sekolah sebagai seorang supervisor adalah menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga guru-guru merasa aman dan bebas, dalam mengembangkan potensi dan Implikasi untuk pembinaan: Kepala sekolah sebagai supervisor perlu mengembangkan gaya kepemimpinan yang inklusif juga bukan hanya administratif tetapi juga mendukung guru secara profesional, menciptakan lingkungan di mana guru merasa kompeten, diberdayakan, dan terdorong untuk berinovasi dalam pembelajaran inklusif, kepala sekolah dapat menumbuhkan motivasi guru dalam menghadapi Siswa Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui dua pilar utama: Pengembangan Profesional dan Dukungan Sumber Daya. Pengembangan profesional diwujudkan dengan menyediakan akses berkelanjutan pada pelatihan internal (IHT) atau eksternal (workshop/seminar) mengenai Pendidikan Inklusif, pembelajaran diferensiasi, dan penanganan jenis-jenis ABK spesifik. Penting juga untuk mendatangkan spesialis atau psikolog guna memberikan pengetahuan praktis tentang profil ABK dan teknik modifikasi perilaku. Sejalan dengan itu, dukungan sumber daya harus dipastikan,

meliputi penyediaan alat bantu ajar (seperti kartu komunikasi dan alat sensori) serta sarana prasarana yang memadai. Selain itu, kepala sekolah perlu berupaya menunjuk Guru Pendamping Khusus (GPK) atau membentuk tim pendukung (support team) di sekolah untuk meringankan beban kerja dan meningkatkan efektivitas pengajaran guru kelas, Kegiatan pembinaan dan motivasi bagi guru dalam konteks penanganan ABK efektif dilakukan di berbagai lokasi internal sekolah guna memaksimalkan kemudahan akses dan relevansi konteks. Ruang Guru atau Aula Sekolah berfungsi sebagai pusat pertemuan rutin, diskusi kasus, dan pelaksanaan *In-House Training* (IHT). Sementara itu, Ruang Kelas digunakan untuk aktivitas yang lebih praktis dan mendalam, seperti supervisi klinis dan penerapan model team teaching yang melibatkan Guru Pendamping Khusus (GPK) atau spesialis bersama guru kelas. Lokasi lain yang penting adalah Perpustakaan atau Pusat Sumber Belajar, yang menyediakan ruang yang ideal untuk sesi belajar mandiri (*self-learning*) dan diskusi kelompok kecil yang terfokus. Saat rapat pembagian raport dan juga saat hari guru, Model Perilaku: Kepala sekolah harus mencontohkan perilaku empati dan perhatian terhadap kebutuhan dan kesulitan guru. Program *Shadowing* atau *Day in the Life*: Mengajak seluruh warga sekolah, termasuk staf non-guru, untuk memahami tantangan yang dihadapi siswa ABK dan guru pengampu mereka. Diskusi Reflektif: Mengadakan pertemuan yang fokus pada sudut pandang siswa ABK dan perasaan guru, bukan hanya pada hasil akademik. Kegiatan Sosial Bersama: Mengadakan kegiatan yang melibatkan interaksi non-akademik antara siswa reguler dan ABK, serta antara guru dan staf (misalnya, outing atau kegiatan seni). Komite melibatkan banyak pihak terkait dalam pendidikan inklusif ini dan bertanggung jawab atas semua ini wali kelas melakukan observasi langsung proses pembelajaran anak tersebut. pertanyaan ini sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat dengan informan 2 wali kelas Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang (*kode wcr.04*)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Motivasi guru dalam menghadapi ABK sangat ditopang oleh keterlibatan aktif dalam perencanaan program dan penguatan keyakinan diri (*self-efficacy*). Keterlibatan ini diwujudkan dengan melibatkan guru secara aktif dalam penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI), yang menciptakan rasa kepemilikan terhadap program tersebut. Selain itu, kepala sekolah perlu menciptakan Komunitas Belajar Profesional (PLC) sebagai wadah bagi guru untuk berbagi pengalaman dan solusi terkait ABK. Untuk penguatan *self-efficacy*, kepala sekolah harus menerapkan coaching dan mentoring dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif, serta fokus pada keberhasilan kecil yang dicapai guru maupun siswa ABK. Langkah ini esensial dalam mengubah perspektif guru dari merasa berbeban menjadi melihat tantangan sebagai peluang pengembangan profesionalisme. Terakhir, kepala sekolah harus memastikan beban mengajar guru inklusi proporsional dan bertahap, sesuai dengan kompetensi awal mereka. Selain pembinaan internal, kegiatan pengembangan profesional guru juga harus memanfaatkan sumber daya di luar lingkungan sekolah. Pusat Pelatihan atau Lembaga Diklat menjadi lokasi utama untuk mengikuti workshop dan pelatihan bersertifikat guna memperdalam kompetensi teknis guru dalam menangani ABK. Selain itu, Sekolah Lain yang telah sukses menjalankan program inklusi menjadi tujuan penting untuk Studi Banding, yang memungkinkan guru melihat dan mempelajari secara langsung praktik baik (*best practice*) dalam pengelolaan kelas inklusi, memberikan wawasan praktis, dan inspirasi yang berharga. Pemberian penghargaan yang terjadwal oleh kepala sekolah berfungsi sebagai pengakuan formal atas dedikasi guru dalam menangani ABK. Secara bulanan atau triwulanan, penghargaan dapat diberikan melalui sertifikat seperti "Guru Inspiratif" atau "Guru Berdedikasi" saat rapat pembinaan rutin. Sementara itu, apresiasi tahunan diberikan dalam momen formal yang lebih besar, seperti upacara peringatan Hari Guru, akhir tahun ajaran, atau acara sekolah.

Bentuk penghargaan ini lebih substantif, mencakup plakat, voucher, atau pemberian rekomendasi untuk peningkatan karir dan pelatihan, yang secara langsung mendukung pengembangan profesionalisme guru. Kepala sekolah menanamkan budaya kerja sama (kolaborasi) di sekolah dengan memfokuskan pada struktur dan komunikasi. Langkah struktural melibatkan Pembentukan Tim Lintas Fungsi, yang menggabungkan guru kelas, guru mata pelajaran, konselor, dan staf administrasi untuk menyelesaikan masalah dan menyusun program terpadu seperti PPI. Selain itu, implementasi Sistem Peer Mentoring yang memasangkan guru dengan pengalaman berbeda (senior-baru atau reguler-GPK) mendorong pertukaran pengetahuan dan dukungan timbal balik. Aspek komunikasi difokuskan pada Penekanan pada Visi Bersama, di mana kepala sekolah secara konsisten mengomunikasikan bahwa mendidik ABK adalah tanggung jawab kolektif seluruh warga sekolah. Akhirnya, kepala sekolah wajib Menciptakan Ruang Kolaborasi dengan menyediakan waktu dan tempat yang memadai bagi guru untuk merencanakan dan mengevaluasi program secara bersama-sama. Komite melibatkan banyak pihak terkait dalam pendidikan inklusif ini dan bertanggung jawab atas semua ini wali kelas melakukan observasi langsung proses pembelajaran anak tersebut. pertanyaan ini sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat dengan informan 2 waka kurikulum Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang (*kode wcr.02*)

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kepala sekolah berperan penting sebagai supervisor dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi guru dalam menangani siswa Berkebutuhan Khusus (ABK). menunjukkan bahwa kepala sekolah mampu menumbuhkan motivasi guru melalui dua pilar utama, yaitu pengembangan profesional dan dukungan sumber daya. Pengembangan profesional dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, workshop, seminar, supervisi klinis, serta keterlibatan langsung guru dalam penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI), yang

mendorong rasa kepemilikan dan keyakinan diri (self-efficacy). Dukungan sumber daya diwujudkan melalui penyediaan alat bantu ajar, pembentukan tim pendukung seperti Guru Pendamping Khusus (GPK), hingga pemanfaatan lokasi strategis di sekolah seperti ruang guru, aula, kelas, dan perpustakaan untuk kegiatan pembinaan, refleksi, dan kolaborasi. Kepala sekolah juga memperkuat motivasi guru dengan memberikan *coaching*, mentoring, dan penghargaan rutin yang mengakui dedikasi mereka, serta mencontohkan perilaku empati melalui kegiatan seperti shadowing dan diskusi reflektif. Selain pembinaan internal, pengembangan profesional diperluas melalui pelatihan di lembaga luar dan studi banding ke sekolah inklusi. Lebih jauh, kepala sekolah menumbuhkan budaya kolaboratif dengan membentuk tim lintas fungsi, menerapkan permentoring, mengomunikasikan visi bersama pendidikan inklusif, serta memastikan beban kerja guru proporsional. Seluruh upaya ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program inklusif tidak hanya bergantung pada kompetensi guru, tetapi juga pada kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menghadirkan dukungan struktural, emosional, dan profesional secara berkelanjutan.

5. Sebagai Fasilitator kemitraan (Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah sebagai fasilitator kemitraan bentuk kemitraan yang dibangun kepala sekolah untuk mendukung pendidikan inklusif antara lain kerja sama dengan orang tua siswa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Kerja sama dengan pihak luar penting karena dapat memberikan dukungan tambahan dalam hal sumber daya, keahlian, dan jaringan yang lebih luas untuk mendukung keberhasilan pendidikan inklusif. Mitra yang terlibat dalam program inklusif sekolah antara lain orang tua siswa, guru pendamping khusus, psikolog, terapis, dokter, relawan, dan perwakilan dari lembaga-lembaga terkait. Kepala sekolah memelihara

komunikasi yang efektif dengan mitra eksternal melalui pertemuan rutin, surat menyurat, email, telepon, dan platform komunikasi daring lainnya.. Komite melibatkan banyak pihak terkait dalam pendidikan inklusif ini dan bertanggung jawab atas semua ini wali kelas melakukan observasi langsung proses pembelajaran anak tersebut. pertanyaan ini sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat dengan informan 2 wali kelas Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang (*kode wcr. 05*)

Bentuknya meliputi kerja sama formal (MoU) maupun informal dengan institusi penyedia layanan khusus, seperti Pusat Layanan Autis (PLA), rumah sakit/puskesmas untuk skrining kesehatan, universitas untuk riset, serta pelibatan aktif Komite Sekolah dan komunitas orang tua murid. Karena sekolah seringkali memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) ahli dan fasilitas khusus. Pihak luar membantu dalam proses diagnosis (asesmen), pendampingan terapis, penyediaan alat bantu belajar, serta pemberian pelatihan bagi guru reguler agar mampu menangani anak berkebutuhan khusus (ABK). Pemerintah: Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.Tenaga Ahli: Psikolog, dokter anak, dan terapis (wicara/okupasi).Masyarakat: Organisasi penyandang disabilitas (LSM) dan tokoh masyarakat. Dunia Usaha: Perusahaan penyedia dana CSR untuk fasilitas aksesibilitas. Dengan melakukan pertemuan rutin (rapat koordinasi), memberikan laporan perkembangan program secara transparan, serta memanfaatkan media digital (*WhatsApp group* atau *email*) untuk respons cepat terkait kebutuhan siswa inklusi. (*kode wcr. 07*)

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di SMA Muhammadiyah 4 Palembang, dapat disimpulkan bahwa Kepala sekolah sebagai fasilitator kemitraan Kepala sekolah sebagai fasilitator kemitraan berperan penting dalam membangun, mengelola, dan memperkuat hubungan kolaboratif antara sekolah dan berbagai pihak terkait guna mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk kemitraan yang

dikembangkan meliputi kerja sama dengan orang tua siswa, LSM, serta berbagai lembaga eksternal yang menyediakan dukungan sumber daya, keahlian, dan jaringan yang relevan. Mitra yang terlibat dalam program inklusi mencakup orang tua, guru pendamping khusus, psikolog, terapis, dokter, relawan, dan lembaga profesional lainnya. Kepala sekolah menjaga komunikasi yang efektif dengan para mitra melalui pertemuan rutin, surat menyurat, email, telepon, serta platform daring, sementara komite sekolah turut berperan mendukung koordinasi pendidikan inklusif. Selain itu, wali kelas juga melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran siswa sebagai bagian dari kolaborasi tersebut.

6. Sebagai inovasi (Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Hasil wawancara berdasarkan menunjukkan bahwa Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif melalui berbagai langkah terstruktur. Pembentukan Tim Pendukung Inklusi (TPI) memastikan adanya kolaborasi antara guru, terapis, konselor, dan orang tua dalam mengidentifikasi serta memenuhi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Penyusunan Panduan Operasional Standar Inklusi (POSI) membantu seluruh tenaga pendidik bekerja sesuai prosedur yang jelas dan seragam. Pemanfaatan teknologi informasi meningkatkan aksesibilitas pembelajaran bagi semua siswa, sementara program “guru mitra” memperkuat kerja sama dan peningkatan kompetensi antar guru. Inovasi diperlukan karena kebutuhan siswa berkebutuhan khusus (SBK) dan lingkungan pendidikan terus berkembang. Tanpa inovasi, sistem pendidikan tradisional seringkali tidak mampu menyesuaikan diri dengan keragaman kebutuhan belajar, aksesibilitas, dan metode pengajaran yang efektif bagi semua siswa, sehingga menghambat pencapaian tujuan inklusi yang sebenarnya (yaitu memberikan kesempatan yang setara dan pengalaman belajar yang bermakna).

Peran penting ditempati oleh berbagai pihak, antara lain: kepala sekolah (sebagai pemimpin dan pembimbing), guru (sebagai pelaksana langsung), siswa dan orang tua (sebagai narasumber kebutuhan), tenaga pendukung pendidikan (seperti terapis dan konselor), lembaga pendidikan tinggi (untuk penelitian dan pengembangan), serta pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (untuk kebijakan dan dukungan sumber daya). Inovasi pendidikan inklusif dapat diterapkan di berbagai tempat, antara lain: di dalam kelas reguler (untuk penyesuaian metode mengajar dan materi), di ruang bimbingan dan konseling, di fasilitas prasarana sekolah (untuk meningkatkan aksesibilitas fisik), serta melalui platform daring atau hybrid (untuk memperluas jangkauan akses pembelajaran). Waktu penerapan inovasi bervariasi tergantung pada konteks daerah dan kebijakan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, inovasi dalam pendidikan inklusif mulai berkembang secara lebih serius sejak awal 2000-an, setelah penandatanganan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (KBBH) yang menekankan hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan inklusif. Namun, beberapa inovasi kecil mungkin telah diterapkan sebelumnya oleh sekolah atau guru secara mandiri. Kepala sekolah memulai dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan di sekolah, melakukan analisis situasi, berkolaborasi dengan guru dan pihak terkait untuk merancang solusi inovatif, serta memastikan ketersediaan sumber daya (tenaga, dana, peralatan). Setelah itu, inovasi diuji coba secara terbatas sebelum diterapkan secara luas, Kepala sekolah menggunakan berbagai alat, seperti pengamatan kelas, wawancara dengan guru, siswa, dan orang tua, analisis hasil belajar, serta survei kepuasan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk melihat apakah inovasi mencapai tujuan yang ditetapkan, mengatasi masalah yang ada, dan memberikan dampak positif bagi semua siswa. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk memperbaiki inovasi atau mengembangkan solusi baru. Komite melibatkan banyak pihak terkait

dalam pendidikan inklusif ini dan bertanggung jawab atas semua ini wali kelas melakukan observasi langsung proses pembelajaran anak tersebut. pertanyaan ini sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat dengan informan 2 wali kelas Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang (*kode wcr. 05*)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tentu kepala sekolah memainkan peran kunci sebagai agen perubahan dan inovator dalam pengelolaan pendidikan inklusif. Inovasi yang dilakukan umumnya berfokus pada pembangunan budaya sekolah yang suportif, peningkatan kompetensi guru, dan penyesuaian layanan pendidikan, Inovasi sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan inklusif karena bertujuan untuk Menanggapi Keragaman (*Diversity*) peserta didik termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan non ABK dengan mengembangkan metode, kurikulum, dan media yang *fleksibel* dan personalisasi untuk memenuhi kebutuhan belajar yang unik. Selain itu, inovasi berperan krusial dalam Mengatasi Hambatan Pembelajaran dengan menghadirkan solusi seperti teknologi adaptif atau penerapan *Desain Universal* untuk Pembelajaran (UDL), sehingga hambatan fisik, kurikuler, dan sosial dapat dieliminasi. Melalui inovasi, sekolah dapat Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi proses pengajaran serta memastikan sumber daya yang ada dimanfaatkan secara optimal. Lebih dari sekadar aspek teknis, inovasi juga Mendorong Budaya Inklusif dengan menciptakan lingkungan dan nilai-nilai sekolah yang secara aktif menerima, menghargai, dan mendukung keragaman. Proses pengembangan inovasi dalam pendidikan inklusif merupakan tanggung jawab kolaboratif yang melibatkan banyak pihak. Pemerintah (Pusat & Daerah) berperan sebagai pembuat kebijakan, penyedia dana, dan pengembang kurikulum nasional yang fleksibel, yang kemudian diimplementasikan dan dikelola oleh Kepala Sekolah sebagai pemimpin inovasi dan manajer sumber daya. Di tingkat kelas, Guru dan Tenaga Kependidikan (termasuk Guru Pendamping Khusus/GPK) adalah pelaksana dan pengembang utama yang

merancang serta mencoba metode baru. Keterlibatan Orang Tua/Keluarga sangat penting sebagai mitra yang memberikan masukan mengenai kebutuhan anak dan mendukung implementasi di rumah, sementara Peserta Didik sendiri adalah subjek utama yang masukan dan partisipasinya memastikan inovasi tetap relevan. Terakhir, Komunitas dan Lembaga Swasta/NGO bertindak sebagai pendukung eksternal dengan menyediakan keahlian, pelatihan, dan teknologi pendukung yang diperlukan. Penerapan inovasi dalam pendidikan inklusif bersifat multistap dan berkelanjutan. Inovasi dapat mulai diterapkan pada Tahap Perencanaan (awal tahun ajaran/semester) dengan memasukkannya ke dalam dokumen formal seperti Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) atau *Individualized Education Program* (IEP). Inovasi juga dapat dipicu secara segera Saat Identifikasi Kebutuhan spesifik peserta didik atau tantangan yang muncul (misalnya, pengembangan metode baru untuk mengatasi kesulitan belajar tertentu). Yang terpenting, inovasi harus dilakukan Secara Berkelanjutan (Ongoing) sebagai bagian dari prinsip *continuous improvement*, menyesuaikan diri dengan evolusi kurikulum, perkembangan teknologi, dan perubahan kebutuhan peserta didik dari waktu ke waktu Analisis Kebutuhan (diagnosa data dan masukan) untuk mengidentifikasi area kritis, Perumusan Tujuan dan Desain (menetapkan SMART Goals dan merancang metode baru), Mobilisasi Sumber Daya (alokasi anggaran, pelatihan guru/IHT), dan Uji Coba (*Piloting*) dalam skala kecil. Untuk mengevaluasi efektivitasnya, kepala sekolah melakukan, menetapkan Indikator Keberhasilan (metrik yang jelas), Pengumpulan Data (monitoring, observasi, tes); Analisis Data (membandingkan hasil dengan indikator); dan Refleksi dan Tindak Lanjut (diskusi reflektif seperti Lesson Study) untuk memutuskan apakah inovasi perlu diperluas, dimodifikasi, atau dihentikan. Komite melibatkan banyak pihak terkait dalam pendidikan inklusif ini dan bertanggung jawab atas semua ini wali kelas melakukan observasi langsung proses

pembelajaran anak tersebut. pertanyaan ini sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat dengan informan 2 wali kelas Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang (*kode wcr. 06*)

Penerapan kurikulum akomodatif (fleksibel) Pengembangan aplikasi pemantauan tumbuh kembang siswa. Penyediaan "Resource Room" (Ruang Sumber) yang lengkap. Program Peer Tutoring (teman sebaya membantu ABK). Setiap anak memiliki kebutuhan yang unik dan dinamis. Inovasi diperlukan agar metode pembelajaran tidak kaku, hambatan belajar dapat dikurangi melalui teknologi atau pendekatan baru, dan lingkungan sekolah menjadi semakin ramah (aksesibel) bagi semua siswa. Kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan, Guru Pembimbing Khusus (GPK), guru kelas, tenaga kependidikan, serta masukan dari orang tua dan para ahli/mitra eksternal. (*kode wcr. 08*)

Inovasi diterapkan di seluruh lingkungan sekolah, mulai dari dalam kelas (metode ajar), area publik sekolah (fasilitas fisik seperti ramp atau ubin pengarah), hingga sistem manajemen administrasi sekolah, Inovasi diterapkan di seluruh lingkungan sekolah, mulai dari dalam kelas (metode ajar), area publik sekolah (fasilitas fisik seperti ramp atau ubin pengarah), hingga sistem manajemen administrasi sekolah. Kepala sekolah mengembangkan inovasi dengan merencanakan program baru, melibatkan guru dan staf, serta menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. (*kode wcr. 09*)

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di SMA Muhammadiyah 4 Palembang, dapat disimpulkan bahwa Kepala sekolah memiliki peran sentral sebagai inovator dalam pengembangan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Palembang. Melalui pembentukan sistem pendukung seperti Tim Pendukung Inklusi (TPI), penyusunan Panduan Operasional Standar Inklusi (POSI), serta pemanfaatan teknologi dan program kolaboratif seperti "guru mitra", kepala sekolah mampu mendorong perubahan nyata yang meningkatkan mutu layanan bagi seluruh peserta didik, termasuk

siswa berkebutuhan khusus. Inovasi dilakukan untuk menjawab keragaman kebutuhan belajar, mengatasi hambatan pembelajaran, serta membangun budaya sekolah yang inklusif dan suportif. Pengembangan inovasi dilakukan secara kolaboratif, melibatkan guru, wali kelas, GPK, orang tua, siswa, pemerintah, serta komunitas pendidikan. Penerapannya berlangsung secara bertahap mulai dari perencanaan, identifikasi kebutuhan, penyediaan sumber daya, hingga uji coba dan evaluasi berkelanjutan melalui observasi, analisis data, serta refleksi bersama. Dengan demikian, inovasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah, tetapi juga memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang adil, adaptif, dan bermakna.

7. Akses dan kesetaraan (Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Akses dan kesetaraan dalam pendidikan inklusif merupakan dua aspek penting yang memastikan setiap siswa, tanpa terkecuali, dapat belajar dan berkembang secara optimal. Akses pendidikan mencakup berbagai bentuk dukungan seperti fasilitas fisik yang ramah disabilitas, kurikulum yang dapat dipelajari oleh semua siswa, penggunaan teknologi bantu, penyediaan layanan pendukung seperti guru pendamping dan konselor, serta dukungan finansial agar pendidikan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Sementara itu, kesetaraan berarti memberikan kesempatan yang adil bagi setiap anak melalui penyesuaian metode pembelajaran, penyusunan *Individualized Education Plan* (IEP) bagi siswa berkebutuhan khusus, penerapan sikap nondiskriminatif, evaluasi yang fleksibel, serta penciptaan lingkungan kelas yang menghargai keberagaman. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya membuka akses bagi semua siswa, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan perlakuan dan dukungan yang sesuai untuk mencapai potensi terbaiknya. Sekolah menjamin setiap anak memperoleh kesempatan belajar secara setara

tanpa diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak berbakat istimewa. Semua peserta didik diterima di sekolah reguler dengan pendaftaran terbuka tanpa membedakan fisik, sosial, ekonomi, gender, atau budaya. ABK belajar bersama teman sebaya dalam satu kelas, didukung oleh data dan identifikasi awal terhadap kebutuhan khusus setiap peserta didik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Prinsip tanpa diskriminasi sangat penting diterapkan dalam proses pendaftaran di sekolah untuk memastikan kesempatan yang setara dan adil bagi semua individu untuk mengakses pendidikan, serta untuk membangun lingkungan sekolah yang inklusif dan harmonis. Mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Di lingkungan sekolah reguler, tantangan utama terletak pada ketidaksiapan sistem pendidikan, seperti kurangnya pelatihan yang memadai bagi guru dan belum tersedianya fasilitas yang ramah disabilitas. Untuk mengatasi hambatan ini, pihak sekolah perlu mengimplementasikan solusi konkret, seperti menyediakan guru pendamping khusus, menyusun program pembelajaran individual, dan melengkapi fasilitas yang memadai (misalnya, lift atau landai). Lebih dari sekadar fasilitas fisik, sekolah wajib membangun budaya inklusif sejati yang menerima dan menghormati semua siswa, didukung oleh peran penting teman sebaya dalam menumbuhkan empati, kolaborasi, dan kepercayaan diri pada siswa ABK. Sekolah mengumpulkan data siswa, terutama ABK, melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Data ini meliputi profil belajar siswa, catatan perkembangan, hasil asesmen, serta informasi dari orang tua dan guru. Informasi ini kemudian digunakan untuk menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) agar pembelajaran lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak. Komite melibatkan banyak pihak terkait dalam pendidikan inklusif ini dan bertanggung jawab atas

semua ini guru BK melakukan observasi langsung proses pembelajaran anak tersebut. pertanyaan ini sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat dengan informan 3 guru BK Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang (*kode wcr. 03*)

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di SMA Muhammadiyah 4 Palembang Akses dan kesetaraan dalam pendidikan inklusif menjadi landasan penting untuk memastikan setiap siswa, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak berbakat istimewa, memperoleh kesempatan belajar yang setara tanpa diskriminasi. Sekolah reguler memberikan pendaftaran terbuka bagi semua peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya, maupun gender, serta mengintegrasikan ABK dalam kelas bersama teman sebaya berdasarkan hasil identifikasi awal kebutuhan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK SMA Muhammadiyah 4 Palembang, prinsip nondiskriminasi harus diterapkan sejak proses pendaftaran agar tercipta lingkungan yang adil, harmonis, dan benar-benar inklusif. Namun, pelaksanaan pendidikan inklusif masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan fasilitas ramah disabilitas, serta kurangnya pelatihan guru mengenai pembelajaran bagi ABK. Untuk mengatasi hambatan tersebut, sekolah perlu menyediakan guru pendamping khusus, menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI), dan melengkapi sarana fisik seperti ramp atau lift. Lebih dari itu, sekolah wajib membangun budaya inklusif yang menghargai keberagaman serta mendorong peran teman sebaya dalam menumbuhkan empati dan kepercayaan diri ABK. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen dilakukan oleh wali kelas, guru, dan komite sekolah untuk memahami profil belajar serta kebutuhan ABK, sehingga program pembelajaran dapat disesuaikan secara efektif. Dengan demikian, kerja sama seluruh pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang optimal dan bermakna bagi semua peserta didik.

8. Pembelajaran dalam pendidikan inklusi (Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tentang pembelajaran dalam pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Palembang Evaluasi pembelajaran kognitif siswa dilakukan secara berkala, misalnya setiap akhir semester atau tahun ajaran. Pihak yang terlibat adalah guru mata pelajaran, guru BK (Bimbingan Konseling), kepala sekolah, dan (bila diperlukan) psikolog pendidikan. Bentuk keterbukaan dan layanan tanpa diskriminasi yang diberikan sekolah adalah penerimaan siswa dari berbagai latar belakang tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial ekonomi. Selain itu, sekolah menyediakan layanan bimbingan konseling, fasilitas yang memadai, serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Komite melibatkan banyak pihak terkait dalam pendidikan inklusif ini dan bertanggung jawab atas semua ini guru BK melakukan observasi langsung proses pembelajaran anak tersebut. pertanyaan ini sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat dengan informan 3 guru BK Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang (*kode wcr. 03*)

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran dalam pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Palembang dilaksanakan dengan memastikan bahwa semua peserta didik, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), mendapatkan dukungan sesuai kebutuhan mereka. Proses pembelajaran dirancang berpusat pada siswa, menggunakan diferensiasi pembelajaran serta penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi yang memerlukannya. Keberhasilan pembelajaran ditunjang oleh kolaborasi antara guru mata pelajaran, guru BK, guru pendamping khusus, orang tua, serta pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan nondiskriminatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK, evaluasi pembelajaran kognitif dilakukan

secara berkala pada akhir semester atau tahun ajaran, melibatkan guru, BK, kepala sekolah, dan bila diperlukan psikolog pendidikan. Sekolah juga menerapkan layanan inklusif dengan menerima siswa dari berbagai latar belakang tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial ekonomi, serta menyediakan layanan konseling, fasilitas yang mendukung, dan kesempatan yang sama dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Selain itu, komite sekolah turut berperan dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, sementara guru BK melakukan observasi langsung terhadap proses belajar siswa untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi. Secara keseluruhan, pelaksanaan pembelajaran inklusif di sekolah ini menunjukkan komitmen kuat terhadap kesetaraan, keberagaman, dan kualitas pendidikan bagi semua peserta didik.

9. Prinsip-prinsip Pendidikan Inklusif (Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tentang di SMA Muhammadiyah 4 Palembang Sekolah menjamin fasilitas dan layanan pembelajaran yang sama melalui alokasi sumber daya yang adil, penyediaan fasilitas yang memadai (seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses internet), serta pelatihan guru untuk memberikan pembelajaran yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Bentuk layanan khusus yang diberikan sekolah bagi siswa ABK meliputi guru pendamping khusus, program pembelajaran individual (PPI), terapi (seperti terapi bicara atau okupasi), modifikasi kurikulum, serta fasilitas yang aksesibel (seperti ramp dan toilet khusus). Sekolah menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan bebas diskriminasi melalui penerapan tata tertib yang jelas dan adil, program anti-bullying, pelatihan kesadaran akan keberagaman, mediasi konflik, serta pembentukan tim pencegahan kekerasan di sekolah. Komite melibatkan banyak pihak terkait dalam pendidikan

inklusif ini dan bertanggung jawab atas semua ini guru BK melakukan observasi langsung proses pembelajaran anak tersebut. pertanyaan ini sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat dengan informan 3 guru BK Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang (*kode wcr. 03*)

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bawah Prinsip-prinsip pendidikan inklusif menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, setara, dan sesuai dengan kebutuhannya dalam lingkungan belajar yang terbuka dan nondiskriminatif. Hasil wawancara dengan guru BK di SMA Muhammadiyah 4 Palembang menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan prinsip tersebut melalui penyediaan fasilitas dan layanan pembelajaran yang adil, termasuk perpustakaan, laboratorium, akses internet, serta pelatihan guru agar mampu memberikan pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan siswa. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK), sekolah menyediakan layanan khusus seperti guru pendamping, Program Pembelajaran Individual (PPI), terapi, modifikasi kurikulum, serta fasilitas fisik yang aksesibel seperti ramp dan toilet khusus. Selain itu, sekolah juga menjaga lingkungan yang aman dan nyaman melalui tata tertib yang adil, program anti-bullying, pelatihan keberagaman, mediasi konflik, dan pembentukan tim pencegahan kekerasan. Pelaksanaan pendidikan inklusif ini didukung oleh kerja sama banyak pihak, termasuk komite sekolah yang memegang tanggung jawab penting, serta guru BK yang melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran siswa. Dengan demikian, SMA Muhammadiyah 4 Palembang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan setara bagi seluruh peserta didik.

10. Implementasi pendidikan inklusif (Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tentang di SMA Muhammadiyah 4 Palembang Sekolah memastikan kesempatan belajar yang sama melalui penerapan sistem inklusi yang komprehensif, yang mencakup penyediaan fasilitas yang aksesibel, guru pendamping khusus, program pembelajaran individual (PPI), serta pelatihan bagi guru untuk memahami dan memenuhi kebutuhan siswa ABK. Selain itu, sekolah juga menerapkan kebijakan anti-diskriminasi yang ditegakkan secara konsisten. Ya, pihak sekolah mengetahui dan mengacu pada berbagai kebijakan internasional yang mendukung pendidikan inklusif, seperti Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB (UNCRPD) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 4 tentang pendidikan berkualitas untuk semua. Strategi guru untuk mengoptimalkan potensi akademik anak berkebutuhan khusus meliputi modifikasi kurikulum, penggunaan metode pembelajaran yang beragam dan sesuai dengan gaya belajar siswa, pemberian tugas yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, pemanfaatan teknologi bantu, serta kolaborasi dengan orang tua dan tenaga ahli (seperti psikolog pendidikan atau terapis). Komite melibatkan banyak pihak terkait dalam pendidikan inklusif ini dan bertanggung jawab atas semua ini kepala sekolah melakukan observasi langsung proses pembelajaran anak tersebut. pertanyaan ini sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat dengan informan 1 kepala sekolah Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang (*kode wcr.01*).

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah dan guru BK di SMA Muhammadiyah 4 Palembang Implementasi pendidikan inklusif merupakan proses yang didasari oleh landasan fisiologis, yuridis, pedagogis, dan empiris, sehingga pelaksanaannya memiliki dasar yang kuat baik secara nilai, hukum, tujuan pendidikan nasional, maupun bukti praktik di lapangan. Pelaksanaan pendidikan inklusif mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kebijakan dan regulasi seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan dukungan dana

BOP inklusif, pelatihan pendidik, pengembangan kurikulum fleksibel, penyediaan media adaptif seperti braille, hingga fasilitas fisik yang aksesibel seperti ramp dan toilet khusus. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, pemerintah daerah, dan lembaga terkait turut memperkuat ekosistem pendidikan yang inklusif, disertai evaluasi berkelanjutan agar program terus berkembang. Berdasarkan hasil wawancara di SMA Muhammadiyah 4 Palembang, sekolah telah menerapkan sistem inklusi secara komprehensif, termasuk penyediaan fasilitas aksesibel, keberadaan guru pendamping khusus, Program Pembelajaran Individual (PPI), dan pelatihan guru agar mampu memahami kebutuhan siswa ABK. Sekolah juga konsisten menerapkan kebijakan anti-diskriminasi serta mengacu pada kebijakan internasional seperti UNCRPD dan SDGs nomor 4. Untuk mengoptimalkan potensi akademik siswa berkebutuhan khusus, guru menerapkan modifikasi kurikulum, metode pembelajaran yang beragam, penyesuaian tugas, penggunaan teknologi bantu, serta kolaborasi dengan orang tua dan tenaga ahli. Komite sekolah dan berbagai pihak terkait turut berperan aktif dalam pelaksanaan program ini, sementara kepala sekolah melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran guna memastikan layanan pendidikan inklusif berjalan sesuai pedoman dan kebutuhan siswa.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Bedasarkan Hasil Penelitian yang sudah dirangkum mengenai Peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif SMA Muhammadiyah 4 Palembang

1. Pembahasan Mengenai Sebagai Pendidik (Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Sebagai pendidik adalah sebagai pendidik peran kepala sekolah dalam memberikan pembinaan, arahan, dan fasilitasi proses pendidikan kepada guru, staf, dan siswa, agar kegiatan belajar mengajar. Menurut (septy nurfadhillah, 2021) berjalan efektif dan mencapai tujuan pendidikan sekolah, Kepala sekolah memiliki

pemahaman yang mendalam tentang prinsip pendidikan inklusif dan mampu menerapkannya melalui berbagai tindakan nyata, yaitu dengan menciptakan budaya sekolah yang menghargai keberagaman, menanamkan nilai toleransi, saling menghargai, dan empati kepada seluruh warga sekolah; mendukung pengembangan kurikulum yang fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan siswa dengan menerapkan pendekatan diferensiasi pembelajaran serta *Universal Design for Learning (UDL)*; memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi guru dan staf agar memiliki kompetensi dalam menangani kebutuhan belajar yang beragam; menjalin kerja sama dengan orang tua, komunitas, dan tenaga ahli untuk mendukung proses pembelajaran; serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program inklusif guna menyesuaikan kebijakan sekolah dengan kebutuhan siswa. Kepala sekolah juga berperan sebagai pembimbing dan teladan bagi guru, siswa, dan seluruh warga sekolah dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, adil, dan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Pendidikan inklusif adalah pendekatan sistem pendidikan yang memberi kesempatan kepada semua murid, tanpa kecuali, untuk belajar dalam lingkungan pendidikan yang sama, meskipun mereka memiliki perbedaan kebutuhan (misalnya anak berkebutuhan khusus), Konsep ini bukan hanya untuk anak disabilitas, tetapi juga untuk semua siswa yang “berbeda” dalam gaya belajar, potensi, latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, Dalam penerapan, sekolah inklusif harus melakukan penyesuaian seperti fleksibilitas kurikulum, metode pembelajaran yang adaptif, dan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan individual peserta didik. Inklusi memastikan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus punya hak mendapatkan pendidikan yang setara, sesuai dengan hak asasi pendidikan, Inklusi membantu menumbuhkan budaya sekolah yang toleran, mengajarkan siswa reguler untuk menghargai perbedaan, dan membangun empati. Kepala sekolah,

waka kurikulum, wali kelas, guru BK dan murid ABK. Kegiatannya bisa dimasjid diruangan atau kantor karena tidak ada ruangan khusus untuk anak ABK karena fasilitasnya memandai. Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia mulai digalakkan secara formal pada awal tahun 2000-an, ditandai dengan dikeluarkannya berbagai peraturan seperti Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang mewajibkan sekolah umum menerima siswa berkebutuhan khusus. Dimana harus pentapan visi dan misi yang jelas dan juga guru harus diadakan pelatihan secara workshop secara baik agar memahami murid saat belajar secara berkala.

Hal ini sejalan dengan kepala sekolah sebagai pendidik maka semua pengajar termasuk guru mapel wali kelas atau guru BK termasuk semua dalam sekolah tersebut melihat perkembangan anak berkebutuhan khusus dapat pelajaran yang layak sebagai murid tersebut menurut (Rhendivan Pasaribu, Usman Radiana & Salarasat, 2023).

2. Pembahasan Mengenai Sebagai Manajer (Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Kepala Sekolah sebagai Manajer Dan juga Mengelola tenaga kependidikan ini, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi guru menurut (Firdiansyah Alhabsyi, Sagaf S. Pettalongi, 2022) Dalam hal ini, kepala sekolah harus dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan Kepala sekolah sebagai manajer berperan sentral dalam mengelola seluruh aspek sekolah agar berjalan efektif dan inklusif. Ia tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan administratif, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu menggerakkan, memotivasi, dan mengarahkan guru serta tenaga

kependidikan untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang adil, adaptif, dan berpihak pada semua anak (BUDAYA & DASAR, 2025).

Sesuai dengan informasi hasil wawancara bahwa dalam Bentuk kebijakan dan program yang mendukung pendidikan inklusif mencakup pelatihan guru, penyesuaian kurikulum dan pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta dukungan guru pendamping. Kebijakan juga mencakup peraturan yang mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di setiap daerah untuk memastikan hak anak berkebutuhan khusus mendapatkan akses pendidikan yang sama, anak berkebutuhan khusus banyak membawa manfaat bagi anak itu sendiri. Pendidikan dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus akan dikembangkan dan berguna bagi kehidupannya, karena banyak anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh anak pada umumnya. Data atau dokumen disimpan diruangan guru bimbingan konseling karena gurunya baru masuk tiga bulan maka data baru diberikan oleh kepala sekolah maka data tersebut belum dibaca dan dilihat secara akurat. Evaluasi program inklusif dapat dilakukan secara berkala (misalnya setiap bagi rapot atau satu tahun sekali), selama proses pembelajaran, dan setelah proses pembelajaran selesai. Waktu evaluasi yang tepat bergantung pada tujuan dan kebijakan program, namun evaluasi rutin atau selama proses berjalan penting untuk memantau kemajuan secara berkelanjutan. Kepala sekolah mengelola sumber daya untuk mendukung kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan menetapkan visi inklusif, mengembangkan kurikulum yang fleksibel, memastikan guru memiliki pelatihan yang memadai, menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang aksesibel, serta membangun kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Kepala sekolah juga perlu melakukan evaluasi dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan program berjalan efektif

Hal hasil sejalan dengan apa yang diatas menurut (BUDAYA & DASAR, 2025) dan juga ada pakar lagi tentang kepala sekolah sebagai manajer menurut (Firdiansyah Alhabsyi, Sagaf S. Pettalongi, 2022) dan dia menjelaskan pengertian tentang sebagai manajer.

3. Pembahasan Mengenai Sebagai Administrator (Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Kepala sekolah sebagai pengelola keuangan dan administrasi memiliki kemampuan dalam merencanakan, mengalokasikan, mengelola, serta mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan dan administrasi sekolah secara efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran serta pengembangan kompetensi guru. Sebagai administrator menurut (Rhendivan Pasaribu, Usman Radiana & Salarasat, 2023) kepala sekolah bertanggung jawab mengelola seluruh administrasi sekolah agar setiap kegiatan berjalan tertib, efektif, dan sesuai aturan. Fungsi ini mencakup pengelolaan administrasi yang bersifat manajerial, teknis, dan dokumentatif menurut (Firdiansyah Alhabsyi, Sagaf S. Pettalongi, 2022)

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat bawah di SMA Muhammadiyah 4 Palembang, dapat bahwa Kepala sekolah sebagai administrator memiliki tanggung jawab besar dalam merencanakan, mengelola, mengalokasikan, dan mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan serta administrasi sekolah secara efektif dan transparan demi peningkatan mutu pembelajaran dan kompetensi guru. Dalam konteks pembelajaran inklusif, kepala sekolah melakukan supervisi akademik melalui observasi kelas, diskusi, wawancara, serta pembinaan individual, yang bertujuan memantau kualitas pengajaran, mengidentifikasi kebutuhan perbaikan, dan memberikan dukungan profesional bagi guru. Proses supervisi ini melibatkan berbagai pihak seperti pengawas sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru senior, serta wali kelas yang turut melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus. Supervisi dilaksanakan secara berkala sepanjang tahun ajaran, terutama pada awal tahun, setiap awal dan akhir semester, dan pada waktu yang disepakati bersama. Melalui pendekatan positif dan konstruktif, kepala sekolah memberikan umpan balik spesifik,

catatan tertulis, serta saran perbaikan yang jelas. Komite sekolah juga berperan dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, sehingga seluruh pihak dapat bekerja sama memastikan kebutuhan semua siswa terpenuhi. Proses supervisi melibatkan berbagai pihak, seperti kepala sekolah, wali kelas, guru BK, pengawas, komite sekolah, dan masyarakat. Wali kelas juga berperan langsung melakukan observasi pembelajaran siswa ABK serta terlibat aktif dalam pertemuan tatap muka pada saat pembagian rapor atau evaluasi lainnya. Melalui umpan balik yang positif dan konstruktif, kepala sekolah memberikan arahan dan saran dalam menangani siswa ABK agar mereka mendapatkan layanan pendidikan yang setara dan sesuai kebutuhannya. Secara keseluruhan, peran kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor akademik menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan keberhasilan implementasi pendidikan inklusif di sekolah.

Hal hasil sejalan dengan apa yang diatas menurut (Rhendivan Pasaribu, Usman Radiana & Salarasat, 2023) dan juga ada pakar lagi tentang kepala sekolah sebagai administrator menurut Firdiansyah Alhabsyi, Sagaf S. Pettalongi, 2022) dan dia menjelaskan pengertian tentang sebagai administrator.

4. Pembahasan Mengenai Sebagai Supervisor (Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Kepala sekolah Sebagai supervisor dalam program. Peran kepala sekolah sebagai seorang supervisor adalah menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga guru-guru merasa aman dan bebas, dalam mengembangkan potensi dan Implikasi untuk pembinaan: Kepala sekolah sebagai supervisor perlu mengembangkan gaya kepemimpinan yang inklusif juga bukan hanya administratif tetapi juga mendukung guru secara profesional, menciptakan lingkungan di mana guru merasa kompeten, diberdayakan, dan terdorong untuk berinovasi dalam pembelajaran inklusif,

5. Pembahasan Mengenai Fasilitator kemitraan (Peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Kepala sekolah sebagai fasilitator kemitraan memiliki kemampuan untuk membangun, mengelola, dan memperkuat hubungan kolaboratif antara sekolah dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan menurut (Yadisutikno, 2022) Kepala sekolah berperan sebagai penghubung, mediator, dan penggerak sinergi antara guru, orang tua, komite sekolah, pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha dan industri, akademisi, serta organisasi penyandang disabilitas guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan terciptanya lingkungan belajar yang inklusif, partisipatif, serta berkelanjutan menurut (BUDAYA & DASAR, 2025)

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di bawah di SMA Muhammadiyah 4 Palembang, dapat disimpulkan bahwa Kepala sekolah sebagai fasilitator kemitraan berperan penting dalam membangun dan memperkuat hubungan kolaboratif antara sekolah dengan berbagai pihak demi mendukung keberhasilan pendidikan inklusif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Palembang berjalan efektif karena didukung oleh jaringan kemitraan yang luas dan terpadu, melibatkan orang tua siswa, tenaga ahli seperti psikolog dan terapis, pemerintah daerah atau dinas pendidikan, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, serta sekolah lain sebagai mitra berbagai praktik baik. Kemitraan ini berfungsi meningkatkan kualitas program melalui dukungan keahlian, pengalaman, serta sumber daya spesifik yang tidak dimiliki sekolah, sekaligus memperluas dukungan finansial, teknis, dan sosial. Kolaborasi eksternal juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya inklusi dan memfasilitasi akses siswa berkebutuhan khusus (ABK) terhadap layanan pendukung yang relevan. Kepala sekolah bersama wali kelas, guru BK, dan dinas pendidikan bekerja sama untuk memastikan komunikasi yang terbuka dan

transparan melalui pertemuan rutin, evaluasi bersama, serta keterlibatan mitra dalam kegiatan sekolah seperti seminar dan workshop. Untuk menjaga keberlanjutan hubungan, sekolah juga secara konsisten memberikan laporan perkembangan program serta penghargaan atas kontribusi para mitra. Dengan kemitraan multidimensi ini, sekolah mampu menciptakan ekosistem pendidikan inklusif yang holistik, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh peserta didik

Hal hasil sejalan dengan apa yang diatas menurut (Yadi sutikno, 2022) dan juga ada pakar lagi tentang kepala sekolah sebagai Fasilitator kemitraan menurut (BUDAYA & DASAR, 2025) dan dia menjelaskan pengertian tentang sebagai Fasilitator kemitraan

6. Pembahasan Mengenai Sebagai Inovasi (Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Kepala sekolah sebagai inovasi merujuk pada peran pemimpin sekolah dalam mendorong perubahan positif dan berkelanjutan melalui ide-ide baru, strategi kreatif, dan pendekatan yang tidak konvensional menurut (Yadi sutikno, 2022) Ada berapa aspek penting dari kepala sekolah sebagai inovasi penerapan ide atau metode baru yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam efisiensi, efektivitas, atau kualitas dalam Inovasi melibatkan perubahan dalam praktik pengajaran, kurikulum, manajemen sekolah, atau interaksi dengan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik menurut (BUDAYA & DASAR, 2025)

Berdasarkan hasil penelitian ini bawah di SMA Muhammadiyah 4 Palembang, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah memegang peran sentral sebagai inovator dan agen perubahan dalam pengelolaan pendidikan inklusif. Kepala sekolah mendorong penerapan ide-ide baru, strategi kreatif, dan pendekatan non-konvensional untuk meningkatkan

efisiensi, efektivitas, serta kualitas layanan pendidikan bagi seluruh dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kepala sekolah sebagai pemimpin peserta didik, termasuk siswa berkebutuhan khusus (ABK). Inovasi yang dilakukan meliputi penetapan visi inklusif yang kuat, perencanaan kolaboratif, desain ulang struktur sekolah, pengembangan kurikulum fleksibel, dan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan serta supervisi rutin. Pemanfaatan teknologi, pengembangan sistem pendukung pembelajaran, serta penciptaan budaya sekolah yang menerima keragaman menjadi bagian penting dari upaya inovasi tersebut. Inovasi dipandang sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan inklusif karena mampu menjawab keragaman kebutuhan peserta didik, mengatasi hambatan pembelajaran melalui metode kreatif dan teknologi adaptif, serta meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pembelajaran. Di samping itu, inovasi membantu membangun budaya sekolah yang suportif, adil, dan ramah terhadap perbedaan, sehingga setiap siswa dapat mencapai potensi optimalnya. Pengembangan inovasi dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai inovasi, guru dan wali kelas sebagai pelaksana langsung di lapangan, guru BK dan GPK sebagai pemberi dukungan teknis, hingga orang tua, komite sekolah, dan komunitas sebagai mitra pendukung. Implementasi inovasi berlangsung di seluruh lingkungan sekolah di kelas, ruang kantor, perpustakaan, masjid, serta lingkungan belajar lainnya dan telah diterapkan sejak lima tahun terakhir, terus berlanjut hingga kini sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Kepala sekolah mengembangkan dan mengevaluasi inovasi melalui proses sistematis yang mencakup analisis kebutuhan, perumusan tujuan yang jelas, mobilisasi sumber daya, uji coba metode, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Evaluasi efektivitas dilakukan dengan mengukur indikator kinerja seperti hasil belajar siswa, observasi kelas, survei kepuasan, serta umpan balik dari guru, siswa, dan orang tua. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar tindak lanjut untuk memperluas, memodifikasi, atau memperbaiki

inovasi yang diterapkan. Dengan demikian, inovasi dalam pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Palembang berjalan dalam kerangka kolaboratif, sistematis, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan

Hal hasil sejalan dengan apa yang diatas menurut (Yadi sutikno, 2022) dan juga ada pakar lagi tentang kepala sekolah sebagai inovasi menurut (BUDAYA & DASAR, 2025) dan dia menjelaskan pengertian tentang sebagai inovasi.

7. Pembahasan Mengenai Akses Dan Kestaraan (Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Akses dan kesetaraan dalam pendidikan inklusif merupakan dua aspek penting yang memastikan setiap siswa, tanpa terkecuali, dapat belajar dan berkembang secara optimal menurut (Ari Pratiwi, Alies Poetri lintangsari, Ulfah Fatmala Rizky, 2020) Akses pendidikan mencakup berbagai bentuk dukungan seperti fasilitas fisik yang ramah disabilitas, kurikulum yang dapat dipelajari oleh semua siswa, penggunaan teknologi bantu, penyediaan layanan pendukung seperti guru pendamping dan konselor, serta dukungan finansial agar pendidikan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Sementara itu, kesetaraan berarti memberikan kesempatan yang adil bagi setiap anak melalui penyesuaian metode pembelajaran, penyusunan Individualized Education Plan (IEP) bagi siswa berkebutuhan khusus, penerapan sikap nondiskriminatif, evaluasi yang fleksibel, serta penciptaan lingkungan kelas yang menghargai keberagaman. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya membuka akses bagi semua siswa, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan perlakuan dan dukungan yang sesuai untuk mencapai potensi terbaiknya. Sekolah menjamin setiap anak memperoleh kesempatan belajar secara setara tanpa diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak berbakat istimewa menurut (Melia, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian ini bawah di SMA Muhammadiyah 4 Palembang Akses dan kesetaraan dalam pendidikan inklusif menjadi landasan penting untuk memastikan setiap siswa, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak berbakat istimewa, memperoleh kesempatan belajar yang setara tanpa diskriminasi. Sekolah reguler memberikan pendaftaran terbuka bagi semua peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya, maupun gender, serta mengintegrasikan ABK dalam kelas bersama teman sebaya berdasarkan hasil identifikasi awal kebutuhan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK SMA Muhammadiyah 4 Palembang, prinsip non diskriminasi harus diterapkan sejak proses pendaftaran agar tercipta lingkungan yang adil, harmonis, dan benar-benar inklusif. Namun, pelaksanaan pendidikan inklusif masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan fasilitas ramah disabilitas, serta kurangnya pelatihan guru mengenai pembelajaran bagi ABK. Untuk mengatasi hambatan tersebut, sekolah perlu menyediakan guru pendamping khusus, menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI), dan melengkapi sarana fisik seperti ramp atau lift. Lebih dari itu, sekolah wajib membangun budaya inklusif yang menghargai keberagaman serta mendorong peran teman sebaya dalam menumbuhkan empati dan kepercayaan diri ABK. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen dilakukan oleh wali kelas, guru, dan komite sekolah untuk memahami profil belajar serta kebutuhan ABK, sehingga program pembelajaran dapat disesuaikan secara efektif. Dengan demikian, kerja sama seluruh pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang optimal dan bermakna bagi semua peserta didik.

Hal hasil sejalan dengan apa yang diatas menurut (Ari Pratiwi, Alies Poetri lintangsari, Ulfah Fatmala Rizky, 2020) dan juga ada pakar lagi tentang akses dan kesetaraan menurut (Melia, 2022). dan dia menjelaskan pengertian tentang akses dan kesetaraan.

8. Pembahasan Mengenai Pembelajaran Dalam Pendidikan Inklusi (Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Pembelajaran dalam pendidikan inklusif merupakan proses belajar yang dirancang agar semua peserta didik, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan siswa dengan latar belakang beragam, dapat belajar bersama dalam satu lingkungan yang sama dengan dukungan yang sesuai kebutuhan mereka. Pembelajaran ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan individu melalui strategi yang berpusat pada siswa, diferensiasi pembelajaran, serta penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI/IEP) bagi siswa yang memerlukannya menurut (Melia, 2022). Keberhasilan pembelajaran inklusif juga ditunjang oleh kolaborasi antara guru, orang tua, dan guru pendamping khusus, serta penciptaan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan nondiskriminatif. Selain itu, penggunaan media dan teknologi bantu, pelaksanaan evaluasi yang fleksibel, dan penerapan interaksi sosial positif turut memastikan setiap siswa dapat berkembang secara optimal menurut (teni marliyani, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian ini bawah Pembelajaran dalam pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Palembang dilaksanakan dengan memastikan bahwa semua peserta didik, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), mendapatkan dukungan sesuai kebutuhan mereka. Proses pembelajaran dirancang berpusat pada siswa, menggunakan diferensiasi pembelajaran serta penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi yang memerlukannya. Keberhasilan pembelajaran ditunjang oleh kolaborasi antara guru mata pelajaran, guru BK, guru pendamping khusus, orang tua, serta pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan nondiskriminatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK, evaluasi pembelajaran kognitif dilakukan secara berkala pada akhir semester atau tahun ajaran, melibatkan guru, BK, kepala sekolah, dan bila diperlukan psikolog pendidikan. Sekolah juga menerapkan layanan

inklusif dengan menerima siswa dari berbagai latar belakang tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial ekonomi, serta menyediakan layanan konseling, fasilitas yang mendukung, dan kesempatan yang sama dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Selain itu, komite sekolah turut berperan dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, sementara guru BK melakukan observasi langsung terhadap proses belajar siswa untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi. Secara keseluruhan, pelaksanaan pembelajaran inklusif di sekolah ini menunjukkan komitmen kuat terhadap kesetaraan, keberagaman, dan kualitas pendidikan bagi semua peserta didik.

Hal hasil sejalan dengan apa yang diatas menurut (Ari Pratiwi, Alies Poetri lintangsari, Ulfah Fatmala Rizky, 2020) dan juga ada pakar lagi tentang Pembelajaran Dalam Pendidikan Inklusi menurut (teni marliyani, 2023). dan dia menjelaskan pengertian tentang Pembelajaran Dalam Pendidikan Inklusi.

9. Pembahasan Mengenai Prinsip - Prinsip Pendidikan Inklusi (Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Prinsip-prinsip pendidikan inklusif menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak, setara, dan sesuai dengan kebutuhannya dalam lingkungan belajar yang terbuka, non diskriminatif, dan menghargai keberagaman. Pendidikan inklusif menjamin bahwa semua peserta didik diterima tanpa membedakan disabilitas, latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, maupun kondisi lainnya, serta diberikan akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan pendidikan menurut (Sukawati و آخ, 2020)

Berdasarkan hasil penelitian ini bawah Prinsip-prinsip pendidikan inklusif menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, setara, dan sesuai dengan kebutuhannya dalam lingkungan belajar yang terbuka dan nondiskriminatif. Hasil wawancara

dengan guru BK di SMA Muhammadiyah 4 Palembang menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan prinsip tersebut melalui penyediaan fasilitas dan layanan pembelajaran yang adil, termasuk perpustakaan, laboratorium, akses internet, serta pelatihan guru agar mampu memberikan pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan siswa. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK), sekolah menyediakan layanan khusus seperti guru pendamping, Program Pembelajaran Individual (PPI), terapi, modifikasi kurikulum, serta fasilitas fisik yang aksesibel seperti ramp dan toilet khusus. Selain itu, sekolah juga menjaga lingkungan yang aman dan nyaman melalui tata tertib yang adil, program anti-bullying, pelatihan keberagaman, mediasi konflik, dan pembentukan tim pencegahan kekerasan. Pelaksanaan pendidikan inklusif ini didukung oleh kerja sama banyak pihak, termasuk komite sekolah yang memegang tanggung jawab penting, serta guru BK yang melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran siswa. Dengan demikian, SMA Muhammadiyah 4 Palembang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan setara bagi seluruh peserta didik.

Hal hasil sejalan dengan apa yang diatas menurut (Sukawati وآخ., 2020) dan di bahas tentang prinsip - prinsip Pendidikan Inklusi. dan dia menjelaskan pengertian tentang Pembelajaran Dalam Pendidikan Inklusi.

10. Pembahasan Mengenai Implementasi pendidikan inklusif (Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusif Di SMA Muhammadiyah 4 Palembang)

Implementasi pendidikan inklusif adalah Pendidikan inklusif memiliki landasan yang komprehensif, meliputi landasan fisiologis yang berakar pada nilai kebangsaan, landasan yuridis sebagai legitimasi hukum, landasan pedagogis yang mengacu pada tujuan Pendidikan Nasional, serta landasan empiris yang didukung oleh bukti penelitian dan praktik menurut (Melia, 2022) mencakup berbagai aspek penting,

mulai dari kebijakan dan regulasi yang memadai, seperti dukungan pemerintah melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan penyaluran dana BOP inklusif, hingga pelatihan pendidik agar mampu mengidentifikasi kebutuhan siswa dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai menurut (Arya Setya Nugroho & Wiryanto, 2022)

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah dan guru BK di SMA Muhammadiyah 4 Palembang Implementasi pendidikan inklusif merupakan proses yang didasari oleh landasan fisiologis, yuridis, pedagogis, dan empiris, sehingga pelaksanaannya memiliki dasar yang kuat baik secara nilai, hukum, tujuan pendidikan nasional, maupun bukti praktik di lapangan. Pelaksanaan pendidikan inklusif mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kebijakan dan regulasi seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan dukungan dana BOP inklusif, pelatihan pendidik, pengembangan kurikulum fleksibel, penyediaan media adaptif seperti braille, hingga fasilitas fisik yang aksesibel seperti ramp dan toilet khusus. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, pemerintah daerah, dan lembaga terkait turut memperkuat ekosistem pendidikan yang inklusif, disertai evaluasi berkelanjutan agar program terus berkembang. Berdasarkan hasil wawancara di SMA Muhammadiyah 4 Palembang, sekolah telah menerapkan sistem inklusi secara komprehensif, termasuk penyediaan fasilitas aksesibel, keberadaan guru pendamping khusus, Program Pembelajaran Individual (PPI), dan pelatihan guru agar mampu memahami kebutuhan siswa ABK. Sekolah juga konsisten menerapkan kebijakan anti-diskriminasi serta mengacu pada kebijakan internasional seperti UNCRC dan SDGs nomor 4. Untuk mengoptimalkan potensi akademik siswa berkebutuhan khusus, guru menerapkan modifikasi kurikulum, metode pembelajaran yang beragam, penyesuaian tugas, penggunaan teknologi bantu, serta kolaborasi dengan orang tua dan tenaga ahli. Komite sekolah dan berbagai pihak terkait turut berperan aktif dalam pelaksanaan program

ini, sementara kepala sekolah melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran guna memastikan layanan pendidikan inklusif berjalan sesuai pedoman dan kebutuhan siswa. Hal hasil sejalan dengan apa yang diatas menurut (Melia, 2022) dan di bahas tentang Implementasi Pendidikan Inklusif. dan dia menjelaskan pengertian tentang Pembelajaran Dalam Pendidikan Inklusif menurut pakar kedua atau teorinya (Arya Setya Nugroho & Wiryanto, 2022)